

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peningkatan kebutuhan masyarakat didalam berbagai bidang, khususnya dibidang telekomunikasi, informasi, dan hiburan dirasakan semakin meningkat akibat adanya saling keterkaitan dan ketergantungan umat manusia didunia dalam era globalisasi ini. Salah satu kebutuhan yang paling mencolok peningkatannya adalah kebutuhan akan informasi. Perkembangan teknologi informasi didalam era globalisasi ini mutlak diperlukan bagi individu ataupun organisasi, baik itu publik dan swasta.

Informasi merupakan faktor penting bagi organisasi untuk dapat menentukan suatu skala prioritas, yaitu mampu memilih, menyeleksi atau mengolah informasi yang ada sehingga organisasi bisa mendapatkan akses didalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Dan seiring dengan adanya pembangunan, organisasi - organisasi publik maupun swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektifitas, produktifitas, dan efisiensi. Kondisi kebutuhan informasi yang handal bagi organisasi kemudian dikenal sebagai suatu sistem pengelolaan informasi yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Menurut Machmud, Rizan (2013) Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen.

Menurut Wahyudi dan Agus (2001) Tujuan adanya SIM adalah supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat dihandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan - keputusan strategis.

Kewajiban penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI seharusnya sudah diimplementasikan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk itu BPKP berupaya memfasilitasi penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan “Diklat Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dengan SIMDA”. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Iman Achmad Nugraha, dalam acara pembukaan Diklat Implementasi SAP berbasis AkruaI dengan SIMDA di Aula Kantor Lembaga Penjamin Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung, Senin (19/10). (kabarterkini.lampung)

SIMDA merupakan suatu bentuk pengembangan teknologi dalam bidang informasi yang dilakukan pemerintah guna memberikan akses informasi yang handal, cepat, tepat dan akurat guna kepentingan bersama. SIMDA ini dapat mempermudah pemerintah didalam memberikan arah, pedoman, dan landasan hukum bagi pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi manajemen agar berbagai macam jenis informasi yang ada dapat dikelola dengan maksimal, sehingga akan mempermudah jalinan komunikasi antara unit-unit yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dapat pula terjalin hubungan antara pemerintah dengan publik, dan juga pemerintah dengan swasta. (theorykeuangaeraah.blogspot.co.id)

Melalui penyelenggaraan diklat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan SAP berbasis akruaI dan dapat dilakukan evaluasi atas pelaksanaan implementasi SIMDA pada masing-masing Pemerintah Daerah se-Propinsi Lampung. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan. Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang

merupakan pengganti dari PP nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut :

“Untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat 3 fungsi utama sektor publik yaitu: melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum, mendefinisikan prinsip operasional masyarakat dan menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.

Sedangkan menurut Wahyundaru (2001) Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Menurut Ridwan (2009) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi merupakan kemewahan akan tetapi sudah merupakan keharusan. Efisien, efektifitas, dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan baik pada tingkat individu, kelompok maupun pada tingkat organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.

Dinas kominfo memiliki peranan dalam hal pengelolaan dan pengembangan SIMDA. Keberadaan dari SIMDA ini didalam dinas komunikasi dan informasi Kota Bandar Lampung merupakan suatu bentuk sistem informasi manajemen yang dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai alat dalam menghasilkan suatu produk informasi dan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu sebagai media komunikasi bagi tiap-tiap unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dikarenakan selama ini alat untuk bisa menghubungkan antara instansi-instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal transfer informasi ataupun

mengetahui kinerja dari masing-masing unit kerja tersebut belum ada. Sehingga apabila ada suatu instansi membutuhkan informasi harus mencari langsung kepada instansi yang dituju.

Keberadaan SIMDA yang berbasis kepada penggunaan komputerisasi mutlak diperlukan bagi organisasi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung. Karena suatu organisasi pemerintah yang terdiri dari berbagai macam sistem layaknya suatu negara membutuhkan interaksi untuk bisa saling berhubungan dan saling tukar - menukar informasi. Dalam melakukan interaksi tersebut sebuah media sangat diperlukan dan dalam hal inilah keberadaan SIMDA. Dinas komunikasi dan informasi kota Bandar Lampung dalam hal ini ditunjuk sebagai pihak yang menjalankan SIMDA.

Selain itu Dinas komunikasi dan informasi kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Pemerintah dibidang informasi dan komunikasi diharapkan menjadi sebuah pusat data yang dapat menampung keseluruhan informasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga dengan demikian akan terjalin satu kesatuan diantara instansi–instansi yang ada dalam hal penyampaian informasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing instansi tersebut.

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah.
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing- msing dinas/ lembaga.

SIMDA dirancang oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan pendapatan dan belanja daerah (APBD). SIMDA mengalami empat tahapan perubahan salah satu aplikasi

SIMDA versi 2.7. Sistem aplikasi tersebut dapat digunakan sebagai pengolahan data keuangan pemerintah daerah. ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id))

Visi yang dibuat oleh BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*.

Sedangkan menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah “setiap pelaksanaan keuangan telah terkoneksi langsung melalui sistem dan terhubung langsung dengan Bank Pemerintah, guna meminimalisasi terjadinya kesalahan data dan diharapkan kerja sama ini dapat terus dilaksanakan di seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung”, ([antaranews.com](http://antaranews.com)).

Teknologi informasi (TI) *governance* seperti SIMDA versi 2.7 menyediakan struktur yang menghubungkan proses teknologi informasi (TI), sumber daya teknologi informasi (TI) dan informasi bagi strategi dan tujuan organisasi. Lebih jauh lagi teknologi informasi *governance* menggabungkan *good (best) practice* dari perencanaan dan pengorganisasian teknologi informasi (TI), pembangunan dan pengimplementasian, *delivery* dan *support*, serta memonitor kinerja teknologi informasi (TI) untuk memastikan kalau informasi organisasi dan teknologi yang berhubungan mendukung tujuan organisasi khususnya pemerintah daerah. Adanya pengakuan mengenai *potensial strategic* dari sistem informasi dan kemungkinan meningkatnya *competitive advantage* telah menyebabkan meningkatnya atensi

terhadap perencanaan sistem informasi. Peningkatan kematangan perencanaan sistem informasi akan menghasilkan sistem informasi yang lebih baik. Efektivitas perencanaan itu sendiri dinilai berdasarkan manfaat proses perencanaan sistem informasi, tetapi yang lebih umum penilaian didasarkan pada kesuksesan secara menyeluruh dari sistem informasi organisasinya.

Disini Simda versi 2.7.6.0 terdapat perbaikan versi nya seperti ditambah Proses Entry Ketetapan Pendapatan, perbaikan Proses Entry Bukti Penerimaan terkait Ketetapan Pendapatan, perbaikan Proses Entry STS terkait Ketetapan Pendapatan, ditambah kolom NTPN pada Form Penyetoran Pajak, pembukaan Fitur Import Saldo Awal saat login tahun sebelumnya, perbaikan Proses Entry Bukti Pengeluaran, pada pemilihan Rekening dari data Panjar ditampilkan duluan, perbaikan Proses Entry Bukti Pengeluaran, perbaikan fitur Cari, perbaikan Proses Entry Bukti Pengeluaran, kontrol Sisa SPD tidak jalan apabila di ubah, perbaikan Proses Tutup Tahun, penambahan Fitur Export Import Jurnal Akrual, penambahan Fitur Export Import Ketetapan Pendapatan, perbaikan Laporan Daftar Penguji, perbaikan pengelompokan potongan pajak, perbaikan Proses Entry Rincian SPP, data tidak dapat disimpan apabila jenis tagihan dan rek belanja berbeda, perbaikan Proses Entry SPP, jenis tagihan tidak dapat dirubah apabila sudah ada rincian. (simdakeuangan.versi-2-7-0-6)

Dalam penelitian Noormaliya (2015) tentang pengaruh integrasi organisasi dan kematangan perencanaan sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi program sistem informasi keuangan daerah. Hasilnya bahwa integrasi organisasi mempengaruhi kematangan perencanaan sistem informasi dan berpedoman terhadap kesuksesan implementasi program sistem informasi keuangan daerah.

Dan dalam penelitian Masnoni & Latifah (2009) yang meneliti judul pengaruh integrasi organisasi terhadap kematangan perencanaan sistem informasi dan implikasinya terhadap kesuksesan program aplikasi sistem informasi manajemen daerah. Dalam penelitian ini didapat hasil yaitu integrasi organisasi dan

kematangan perencanaan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kesuksesan program aplikasi SIMDA.

Program SIMDA yang telah diimplementasikan meliputi : implementasi SIMDA keuangan, SIMDA barang milik daerah (BMD), SIMDA gaji dan SIMDA pendapatan. Adanya pengakuan mengenai potensi dari sistem informasi dan kemungkinan meningkatkan kompetitif telah menyebabkan meningkatnya atensi terhadap perencanaan sistem informasi. Peningkatan kematangan perencanaan sistem informasi akan menghasilkan sistem informasi yang lebih baik.

Fenomena yang terjadi pada aplikasi SIMDA adalah pada penerapan prinsip-prinsip kelola keuangan sesuai sistem informasi keuangan daerah yang ditetapkan oleh UU dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah dikota bandar lampung masih berjalan tidak baik karena masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlambat dalam penyusunan laporan keuangan daerah pada periode pelaporannya dan pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih banyak yang tidak memadai. ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)). (2015/12)

Informasi mengenai SIMDA di kota Bandar Lampung diharapkan mampu untuk memberikan suatu akses informasi dan juga pelayanan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan dengan adanya SIMDA itu mutlak diperlukan agar bisa menghasilkan output yang digunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan di dalam lingkungan pemerintah dan juga terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. ([kabarberitalampung.com](http://kabarberitalampung.com))

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Noormaliya (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian dan variabel dependen. Objek penelitian

sebelumnya dilakukan pada SKPD Kota Padang. Berbeda dengan penelitian Masnoni & Latifah (2009) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Palembang. Dan perbedaan variabel dependen penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel kesuksesan implementasi program aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), yang diambil dari penelitian Noormaliya (2015).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH INTEGRASI ORGANISASI DAN KEMATANGAN PERENCANAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KESUKSESAN IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan penelitian digunakan agar hasil penelitian tidak terlalu melebar dan menyimpang, oleh sebab itu dibuat batasan penelitian sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada kantor SKPD Kota Bandar Lampung.
2. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen (bebas), yaitu Integrasi Organisasi (X1), Kematangan Perencanaan Sistem Informasi (X2) dan variabel dependennya yaitu kesuksesan implementasi program aplikasi sistem informasi manajemen daerah (Y).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan penelitian maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh integrasi organisasi terhadap kesuksesan implementasi program aplikasi sistem informasi manajemen daerah ?
2. Apakah terdapat pengaruh kematangan perencanaan sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi program aplikasi sistem informasi manajemen daerah ?

#### **1.4 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Integrasi organisasi terhadap kesuksesan implementasi program aplikasi sistem informasi manajemen daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kematangan perencanaan sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi program aplikasi sistem informasi manajemen daerah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis
  - Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh integrasi organisasi dan kematangan perencanaan sistem informasi terhadap kesuksesan program aplikasi sistem informasi manajemen daerah, dan juga untuk mengetahui sejauh mana teori yang penulis dapat pada bangku kuliah dapat diterapkan pada praktek.
  - Bagi akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian – penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan saran, dan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan kematangan perencanaan sistem manajemen daerah dalam kesuksesan program aplikasi sistem informasi manajemen daerah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah di lakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

